

## Analisis Pengaruh Dana Perimbangan, Inflasi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kinerja Fiskal di Provinsi Jawa Tengah dalam Penerapan Desentralisasi Fiskal Periode 2012-2015

Wulan Daru Lestari<sup>1</sup> dan Imamudin Yuliadi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

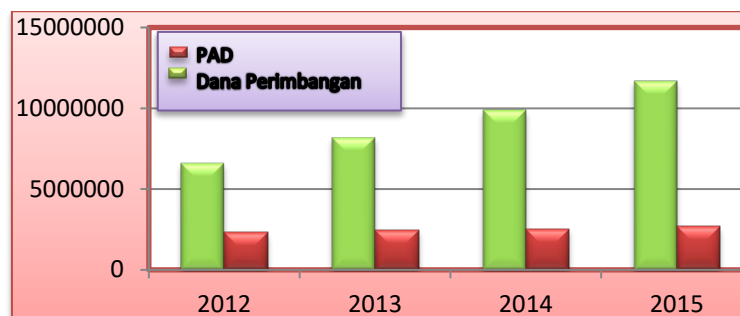
Email korespondensi: [Wulandharue56@gmail.com](mailto:Wulandharue56@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dana Perimbangan, Inflasi dan Jumlah Penduduk terhadap kinerja fiskal di Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan 29 kecamatan dan 6 kota. Dengan menggunakan dua variabel dependen yaitu PAD dan Belanja Daerah. PAD akan di estimasi dengan variabel independen Dana Perimbangan, Inflasi dan Jumlah Penduduk sedangkan Belanja Daerah diestimasi dengan variabel independen Dana Perimbangan, PAD dan Jumlah Penduduk. Hasil analisis diketahui bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Variabel Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD dan Belanja Daerah. Variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

**Kata kunci:** Desentralisasi Fiskal; Dana Perimbangan; PAD; Belanja Daerah; Data Panel.

### Pendahuluan

Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal tersebut dipertegas dengan adanya undang-undang otonomi daerah, undang-undang tersebut antara lain UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya undang-undang maka setiap daerah mempunyai kewenangan mutlak untuk mengatur daerahnya. Bertanggung jawab untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan demokrasi dan keadilan, untuk dapat mewujudkan itu semua tidak dapat terlepas dari masalah finansial di setiap daerah.

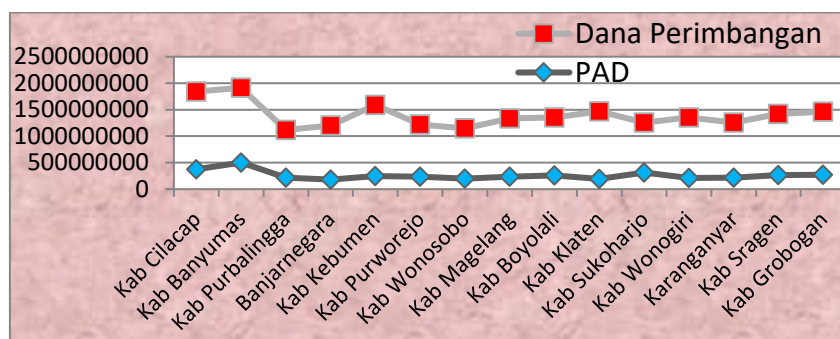


**Gambar 1** Perbandingan PAD dan Dana Perimbangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2015

Sumber: BPS Jawa Tengah

Dari gambar 1 menunjukkan bahwasanya sumber pendapatan yang utama di Provinsi Jawa Tengah berasal dari PAD. Perbandingan antara PAD dan Dana Perimbangan terlihat sangat jauh berbeda. Pendapatan

dana perimbangan hanya berkisar 30% dari PAD. Hal ini berbeda dengan PAD di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Masalah keuangan di setiap daerah timbul karena keterbatasan finansial. Sehingga di perlukan sumber penerimaan lain, salah satunya yaitu bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dibuktikan dari penerimaan Dan Perimbangan yang lebih besar dari PAD.



**Gambar 2** PAD dan Dana Perimbangan di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah  
 Sumber: BPS Kabupaten, diolah

Dari 15 sampel tersebut dapat dibandingkan perolehan PAD dan Dana perimbangan. Alokasi Dana perimbangan pada tabel tersebut tampak selalu lebih besar dari PAD. Kabupaten Cilacap berhasil memperoleh PAD sebesar Rp 373 milyar dengan Dana Perimbangan sebesar Rp 1,467 triliun. Hal ini berarti Kabupaten Cilacap pendapatan dana perimbangannya 4x lipat lebih besar dari PAD. Lalu untuk Kabupaten Kebumen, mampu memperoleh pendapatan dana perimbangan 6x lipat lebih besar dari PAD. Menurut Fisher transfer antar pemerintah merupakan fenomena yang umum terjadi di semua negara di dunia. Transfer pemerintah bertujuan untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang akan muncul, adanya perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal dan pemerataan fiskal di setiap daerah. Alokasi transfer di negara berkembang biasanya di dasarkan pada aspek pengeluaran pemerintah daerah tetapi kurang memperhatikan optimalisasi dari pajak lokal. Akibatnya, pemerintah daerah selalu menuntut adanya transfer pemerintah yang lebih besar bukannya mengoptimalkan basic pajak lokal (Gorodnichenko, 2001).

Menurut Priyo (2009), belanja daerah merupakan fungsi dari pendapatan daerah yang pengeluarannya sangat bergantung dari pendapatan daerah baik yang bersumber dari daerah sendiri ataupun yang bersumber dari transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam analisisnya jika terdapat hubungan yang negatif antara variabel belanja dengan variabel pendapatan maka hal ini disebut dengan ilusi fiskal. Belanja daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Untuk dapat melihat kesiapan daerah dalam otonomi daerah dapat dibuktikan dengan melihat sumber-sumber pendapatannya, apakah sudah mampu untuk menutupi pengeluaran dari anggaran belanja daerah ataukah belum mampu untuk mencukupinya.

**Tabel 1** Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Rincian	2013	2014	2015
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>13.343.358.326</b>	<b>15.157.460.005</b>	<b>17.097.686.334</b>
Pendapatan Asli Daerah	8.212.800.640	9.916.358.232	11.696.822.243
Dana Perimbangan	2.467.814.629	2.542.626.745	2.694.385.621
Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.662.743.057	2.698.475.028	2.706.478.470
<b>Belanja Daerah</b>	<b>12.724.776.308</b>	<b>15.086.065.034</b>	<b>17.337.686.334</b>
Belanja Tidak Langsung	9.213.696.623	11.117.699.785	11.665.348.934
Belanja Langsung	3.511.079.685	3.968.365.249	5.672.337.400
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>618.582.018</b>	<b>71.394.971</b>	<b>-240.000.000</b>

Sumber: BPS Jawa Tengah

Dari tabel 1 dapat dilihat pendapatan daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2015 selalu mengalami peningkatan. Selain pendapatan daerah, belanja daerah di tahun 2013-2015 juga mengalami peningkatan. Dari tabel 1 dapat terlihat perbandingan selisih antara belanja daerah dengan pendapatan daerah. Pada tahun 2013 dan 2014 Provinsi Jawa Tengah mengalami surplus anggaran, namun pada tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah mengalami defisit anggaran sebesar Rp 240 milyar. Menurut Datu (2012), jika terjadi defisit anggaran seperti di tahun 2015 maka untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut disediakan pos tambahan yaitu pos pembiayaan. Pada dasarnya, belanja daerah merupakan salah satu komponen dalam kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kesempatan kerja, meningkatkan laju investasi, menciptakan distribusi pendapatan yang merata dan memelihara kestabilan ekonomi.

## Tinjauan Pustaka

### Sistem Desentralisasi

Desentralisasi menurut UU No. 23 Tahun 2014 merupakan penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi tersebut merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem NKRI. Hal ini berarti pemerintah pusat telah memberikan hak kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Pemberian otonomi mempunyai maksud agar dapat menciptakan daerah mandiri melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan daerah yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan menghidupkan peran aparatur daerah, DPRD dan lembaga dinas lainnya agar bekerja optimal untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah tersebut.

### Pengukuran Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah.

Kinerja sektor pemerintahan bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja fiskal pemerintah adalah informasi finansial (Mardiasmo,2002). Sistem desentralisasi pada otonomi daerah dapat menimbulkan permasalahan dalam penentuan keuangan antara pusat dan daerah. Dimana semua sektor pemerintah membutuhkan dukungan finansial agar berjalannya proses pemerintahan. Perimbangan keuangan antar pusat dan daerah harus berjalan dengan baik melalui independensi keuangan guna membiayai tugas dan kewajiban masing-masing sektor pemerintahan. Daerah diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan finansialnya karna ciri utama daerah otonom yang mampu berotonom sendiri terletak pada keuangan daerahnya dimana daerah otonom tersebut harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber dananya. Sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah dapat diminimalisasi.

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam segala aspek kehidupan. Kemandirian tersebut dapat tercermin dari besaran PAD. PAD menurut Mardiasmo adalah pendapatan yang diperoleh dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Menurut Atep dan Barata, PAD merupakan hak pemerintah daerah atas pendapatan dari penambahan kekayaan bersih atau dalam arti luasnya merupakan seluruh penerimaan kas daerah yang dapat menambah ekuitas dalam suatu periode anggaran tertentu.

### Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran atas kewajiban daerah sebagai pengurangan terhadap nilai kekayaan bersih dalam suatu periode anggaran daerah pada kurun waktu tertentu. Adanya fenomena yang

muncul pada era otonomi mengenai transfer pemerintah khususnya DAU sangat berpengaruh untuk membiayai belanja daerah tetapi kurang berdampak pada PAD di daerah tersebut, maka hal ini dapat diindikasikan sebagai ilusi fiskal. Menurut Priyo (2009), belanja daerah merupakan fungsi dari pendapatan daerah. Belanja daerah merupakan variabel dependen yang pengeluarannya sangat bergantung dari pendapatan daerah baik yang bersumber dari daerah sendiri ataupun yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, sehingga dalam analisisnya jika terdapat hubungan yang negatif antara variabel belanja dengan variabel pendapatan maka hal ini disebut dengan ilusi fiskal.

### **Dana Perimbangan / Transfer Pemerintah**

Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yaitu alokasi suntikan dana dari pemerintah pusat. Sumber dana seperti ini biasanya disebut dengan Dana perimbangan. Dana perimbangan berperan besar bagi tatanan perekonomian pemerintah daerah. Dana perimbangan merupakan dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada daerah yang berguna untuk pembiayaan kebutuhan di daerah. Dana perimbangan berasal dari Penerimaan APBN. Jadi dana perimbangan adalah dana yang akan dialokasikan untuk kebutuhan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

### **Inflasi**

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara umum baik barang maupun jasa selama suatu periode tertentu. Terdapat dua hal penting dalam definisi tentang inflasi yakni : tentang kenaikan harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang maupun jasa dan kenaikan harga secara umum (Pohan, 2008).

### **Jumlah Penduduk**

Penduduk merupakan seluruh warga negara Indonesia baik warga negara asli Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi penduduk merupakan suatu hal yang berkaitan dengan jumlah warga, umur, jenis kelamin, struktur, agama, kelahiran, kematian, perkawinan, kualitas mobilitas persebaran serta ketahanan yang menyangkut ekonomi, politik, budaya dan sosial.

## **Metode Penelitian**

### **Alat Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model data panel. Data panel merupakan alat analisis data yang menggabungkan data time series atau runtut waktu dengan data cross section atau data silang. Dengan rumus data panel sebagai berikut:

$$1) \quad Y_1 = \alpha + b_1X_1it + b_2X_2it + b_3X_3it + e$$

Keterangan:

Y1= PAD

X1= Dana Perimbangan

X2= Inflasi

X3= Jumlah penduduk

Keterangan:

Y2= Belanja Daerah

X1= Dana Perimbangan

X2= PAD

X3= Jumlah penduduk

## Pemilihan Model data Panel

### 1. Uji Chow

Uji Chow berguna untuk menentukan model manakah yang paling tepat untuk digunakan dalam mengestimasi data panel, apakah model fixed effect atau random effect. Uji ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Model Common Effect

$H_1$  : Model Fixed Effect

Penolakan hipotesis didasarkan dengan membandingkan perhitungan F–hitung dengan F–tabel. Perbandingan ini yaitu jika F–hitung lebih kecil dari F–tabel maka  $H_0$  diterima dan model yang digunakan yaitu Common Effect tetapi jika hasilnya F–hitung lebih besar dari F–tabel maka  $H_0$  ditolak dan hasilnya yaitu model Fixed Effect yang digunakan.

### 2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian statistik yang berguna untuk menentukan model yang paling tepat untuk digunakan antara model Fixed Effect/ Random Effect. Hipotesisnya yaitu:

$H_0$  : Model Random Effect

$H_1$  : Model Fixed Effect

Penolakan hipotesis didasarkan pada probabilitasnya yang lebih kecil dari nilai  $\alpha$ ,  $H_0$  ditolak maka Model Fixed Effect yang paling tepat digunakan, namun jika nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai  $\alpha$  maka  $H_0$  diterima dan model Random Effect yang paling tepat digunakan. Nilai  $\alpha$  ini sebesar 5% atau 0,05.

### 3. Uji Lagrange Multiplier

Uji ini tidak perlu digunakan ketika uji sebelumnya uji Chow dan Hausman menunjukkan hasil terbaik yaitu model fixed effect, namun jika uji Chow dan Hausman menunjukkan hasil yang berbeda maka uji LM ini digunakan untuk penentunya dengan hipotesis yaitu:

$H_0$  : Model Common Effect

$H_1$ : Model Random Effect

Jika nilai  $BP_{LM} >$  dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak sehingga random effect merupakan model yang paling baik dibandingkan dengan model common effect, tetapi jika  $BPLM$  kurang dari 0,05 maka  $H_0$  diterima maka model common effect merupakan model yang paling baik.

## Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua asumsi klasik yaitu:

1. Uji Multikolinieritas : Uji ini perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan variabel bebas lebih dari satu.
2. Uji Heteroskedastisitas ini dimungkinkan bahwa data menjuru lebih ke cross section, data ini berarti lebih dekat ke ciri data cross section dibandingkan dengan time series.

### Uji Signifikansi

1. Uji F : Uji ini disebut juga dengan uji anova. Uji ini biasanya digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebasnya terhadap variabel terikat atau berguna untuk menguji signifikansi antar variabel terikat dengan variabel bebas.
2. Uji T : Uji ini berguna untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara individu dengan variabel dependennya dan menganggap variabel lain bersifat konstan.
3. Adjusted R<sup>2</sup> : Uji ini berguna untuk mengetahui besarnya kontribusi yang variabel independen yang menjelaskan variabel dependennya. Nilai R<sup>2</sup> antara 0 sampai 1. Tingkat koefisien determinasi yang mendekati angka 0 dapat menggambarkan bahwa kemampuan variabel independennya dengan variasi variabel dependennya amat kecil dan sebaliknya.

## Hasil dan Pembahasan

### Penentuan Model

#### a. Uji Chow

**Tabel 2** Hasil Uji Chow dari Variabel PAD dan Belanja Daerah

VARIABEL	Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
PAD	Cross-section F	11.779045	(34,102)	0.0000
	Cross-section Chi-Square	223.243724	34	0.0000
VARIABEL	Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
BELANJA	Cross-section F	5.836453	(34,102)	0.0000
DAERAH	Cross-section Chi-Square	151.238253	34	0.0000

Sumber: Data diolah

Hasil uji Chow diatas menunjukkan bahwasanya kedua variabel dependen (PAD dan Belanja Daerah) menunjukkan nilai probabilitas angka 0,0000 berarti nilai probabilitas dari Cross-section F dan Chi Square lebih kecil dari alpa 0,05 sehingga H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Jadi model yang paling baik untuk digunakan yaitu dengan model Fixed effect.

#### b. Uji Hausman

**Tabel 3** Hasil Uji Hausman dari Variabel Dependen PAD dan Belanja Daerah

Test Summary	VARIABEL PAD			VARIABEL BELANJA DAERAH		
	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	97.593067	3	0.0000	61.503910	3	0.0000

Sumber: Data diolah

Hasil uji Hausman test menunjukkan nilai probabilitas cross-section random dari kedua variabel dependen yaitu PAD dan Belanja Daerah menunjukkan hasil sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima dan model yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect.

### Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel.

Hasil pengujian uji Chow dan uji Hausman menunjukkan model yang paling baik digunakan yaitu model

Fixed effect. Pendekatan ini yang nantinya hanya akan mengkombinasi antara data cross section dengan data time series tanpa memperhatikan dimensi waktu dan perilaku antar individu, maka dapat diasumsikan bahwa perilaku setiap Kabupaten / Kota dalam berbagai kurun waktu adalah sama.

**Tabel 4** Hasil Estimasi Model Fixed Effect dari Variabel PAD

Variabel PAD	Model <i>Fixed Effect</i>	Variabel PAD	Model <i>Fixed Effect</i>
Konstanta	-9.366289	<b>Inflasi</b>	-0.000424
Standar error	2.915462	Standar error	0.008116
T – statistic	-3.212626	T – statistic	-0.052266
Probabilitas	0.0018	Probabilitas	0.9584
<b>Dana Perimbangan</b>	0.472738	<b>Jumlah Penduduk</b>	0.0000195
Standar error	0.144929	Standar error	0.00000212
T – statistic	3.261865	T – statistic	9.216266
Probabilitas	0.0015	Probabilitas	0.0000
<b>R<sup>2</sup></b>	0.835748	<b>Prob (F – Statistic)</b>	0.00000
<b>F – Statistic</b>	14.02696	<b>Durbin – Watson Stat</b>	1.443353

Sumber: Data diolah

Hasil estimasi diatas jika ditulis dalam model analisis data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + b_3X_{3it} + e$$

Keterangan:

- Y1 = Variabel dependen (PAD)
- $\alpha$  = Konstanta
- b(1...4) = Koefisien regresi setiap variabel independen
- t = Waktu
- I = Kabupaten / Kota
- X1 = Dana Perimbangan
- X2 = Inflasi
- X3 = Jumlah penduduk
- e = Error term

Hasil dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

$$PAD = -9.366289 + 0.472738 \text{ Dana Perimbangan} - 0.000424 \text{ Inflasi} + 0.0000195 \text{ Jumlah Penduduk}$$

Maka hasil dari persamaan tersebut adalah:

$\alpha$  = Nilai -9.366289 artinya jika semua variabel independen (Dana Perimbangan, Inflasi dan Jumlah penduduk) dianggap konstan maka nilai PAD akan menurun sebesar 9.366289.

b1 = Nilai 0.472738 berarti bahwa ketika Dana Perimbangan naik sebesar 1% maka PAD mengalami kenaikan sebesar 0,472738 dengan asumsi nilai PAD tetap.

b2 = Nilai -0,000424 berarti bahwa ketika Inflasi naik sebesar 1% maka PAD mengalami penurunan sebesar 0,000424 dengan asumsi nilai PAD tetap.

b3 = Nilai 0.0000195 berarti bahwa ketika Jumlah penduduk bertambah 1% maka PAD mengalami kenaikan sebesar 0.0000195 dengan asumsi nilai PAD tetap.

**Tabel 5** Hasil Estimasi Model Fixed Effect dari Variabel Belanja Daerah

Variabel Belanja Daerah	Fixed Effect	Variabel Belanja Daerah	Fixed Effect
Konstanta	8.665697	<b>Inflasi</b>	0.344986
Standar error	1.287700	Standar error	0.041924
T – statistic	6.729592	T – statistic	8.228915
Probabilitas	0.0000	Probabilitas	0.0000
<b>Dana Perimbangan</b>	0.077396	<b>Jumlah Penduduk</b>	0.00000442
Standar error	0.064324	Standar error	0.00000121
T – statistic	1.203211	T – statistic	3.642658
Probabilitas	0.2317	Probabilitas	0.0004
<b>R<sup>2</sup></b>	0.943999	<b>Prob (F – Statistic)</b>	0.000000
<b>F – Statistic</b>	46.47043	<b>Durbin – Watson Stat</b>	2.300657

Sumber : Data diolah

Hasil estimasi diatas jika ditulis dalam model analisis data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_2 = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + b_3X_{3it} + e$$

Keterangan:

Y2 = Belanja Daerah

$\alpha$  = Konstanta

b(1...4) = Koefisien regresi setiap variabel independen

t = Waktu

i = Kabupaten / Kota

X1 = Dana Perimbangan

X2 = Variabel independen 2 (PAD)

X3 = Jumlah Penduduk

e = Error term

Hasil dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

Belanja Daerah = 8.665697 + 0.077396 Dana Perimbangan + 0.344986 PAD + 0.00000442 Jumlah Penduduk

Maka hasil dari persamaan tersebut adalah:

$\alpha$  = Nilai dari 8,665697 menunjukkan jika semua variabel independen (Dana Perimbangan, PAD, dan Jumlah penduduk) dianggap tidak mengalami perubahan atau konstan maka nilai dari Belanja Daerahnya akan mengalami kenaikan sebesar 8,665697.

b1 = Nilai 0,077396 menunjukkan ketika Dana Perimbangan naik sebesar 1% maka Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar 0,077396 dengan asumsi nilai Belanja Daerah tetap.

b2 = Nilai 0,344986 menunjukkan ketika PAD naik sebesar 1% maka Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar 0,344986 dengan asumsi nilai Belanja Daerah tetap.

b3 = Nilai 0.00000442 menunjukkan ketika Jumlah penduduk naik 1% maka Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar 0.00000442 dengan asumsi nilai Belanja Daerah tetap.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas.

Uji multikolinieritas ini berguna untuk menguji data apakah memiliki hubungan linear yang signifikan antar variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini menggunakan metode parsial, dari metode



tersebut rule of thumb menjelaskan bahwa jika nilai koefisien korelasi di atas 0,85 maka nilai tersebut sudah cukup tinggi dan diduga terjadi multikolinearitas antar variabel (Ajija et al, 2011). Multikolinearitas ini biasa terjadi pada data time series. Rule of Thumb menjelaskan apabila terjadi R<sup>2</sup> yang tinggi dan terdapat semua variabel atau sebagian yang tidak signifikan maka diduga terjadi multikolinearitas pada data tersebut. Dalam penelitian ini terdapat masalah multikolinearitas sehingga diduga terjadi hubungan linear antar variabel independennya. Ada beberapa cara dalam memperbaiki masalah multikolinearitas ini, antara lain :

- 1) Menambah data baru,
- 2) Mengombinasikan antara data time series dengan data cross section,
- 3) Mengurangi atau menambah variabel dan lain-lain.

Menurut Hermanto dan Saptutyningasih untuk menghilangkan multikolinearitas dengan cara menghilangkan salah satu variabel atau lebih justru malah berakibat data semakin buruk dibandingkan dengan data yang terdapat multikolinearitas kecuali bila variabel yang akan dihilangkan secara teoritis terlalu berpengaruh. Pendapat itu dipertegas oleh Naftali (2007) yang menjelaskan bahwa masalah multikolinearitas tidak selalu buruk jika memiliki tujuan meramal atau memprediksi karena nilai koefisien determinasi yang tinggi merupakan ukuran yang baik bagi suatu peramalan atau prediksi. Jadi jika terjadi multikolinearitas tetapi nilai koefisien determinasinya tinggi dan signifikansi koefisien slope juga tinggi maka regresi pada umumnya tidak terjadi masalah multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas.

**Tabel 6** Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park dari Variabel PAD

Variabel	Prob.
C	1.0000
LOG(X1?)	1.0000
X2?	1.0000
X3?	10000

Sumber: Data diolah

Tabel di atas menunjukkan hasil dari Uji Heterokedastisitas yang nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, yaitu nilai 1,0000 > 0,05 hal ini berarti variabel independennya tidak terjadi masalah heterokedastisita. Selanjutnya hasil dari uji Heterokedastisitas untuk variabel dependen Belanja Daerah sebagai berikut:

**Tabel 7** Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park dari Variabel Belanja Daerah

Variabel	Prob.
C	1.0000
LOG(X1?)	1.0000
LOG(X2?)	1.0000
X3?	10000

Sumber: Data diolah

Tabel di atas menunjukkan hasil dari Uji Heterokedastisitas yang nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, yaitu nilai 1,0000 > 0,05 hal ini berarti pada variabel independennya tidak terdapat masalah heterokedastisita. Jadi dapat disimpulkan hasil dari uji Heterokedastisitas dari kedua variabel dependen PAD dan Belanja Daerah, untuk variabel independen dari masing-masing variabel dependen sudah terbebas dari masalah heterokedastisitas.

Uji Signifikansi Data

1. Uji F

Uji F biasa disebut dengan uji anova. Uji ini biasanya digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebasnya terhadap variabel terikat atau berguna untuk menguji signifikansi antar variabel terikat

dengan variabel bebas. Hipotesis untuk variabel dependen PAD yaitu:

$H_0$  = Variabel independen (Dana Perimbangan, Inflasi dan Jumlah penduduk) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PAD.

$H_1$  = Variabel independen (Dana Perimbangan, Inflasi dan Jumlah penduduk) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap PAD.

Nilai F – hitung dari Uji Fixed Effect model ini menunjukkan angka sebesar 0.000000 dengan ketentuan  $\alpha = 0,05$  sehingga  $0.000000 < 0,05$  artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Selanjutnya hipotesis untuk variabel dependen Belanja Daerah yaitu:

$H_0$  = Variabel independen (Dana Perimbangan, PAD dan Jumlah penduduk) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

$H_1$  = Variabel independen (Dana Perimbangan, PAD dan Jumlah penduduk) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Nilai F – hitung dari Uji Fixed Effect model ini menunjukkan angka sebesar 0.000000 dengan ketentuan  $\alpha = 0,05$  sehingga  $0.000000 < 0,05$  artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dari nilai probabilitas F-statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Variabel-variabel tersebut yaitu variabel Dana Perimbangan, Inflasi dan Jumlah penduduk terhadap PAD dan variabel Dana Perimbangan, PAD dan Jumlah penduduk terhadap Belanja Daerah. Kesimpulan dari Uji F-statistik tersebut adalah ditolaknya  $H_0$  sehingga  $H_1$  diterima. Hal ini berarti bahwa secara umum semua variabel independen mampu untuk menjelaskan variabel dependennya yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah.

## 2. Uji T

**Tabel 8** Hasil Uji Statistik dari variabel PAD

Variabel	Koefisien Regresi	Prob.	Standar Probabilitas
PAD	-9.366289	0.0018	5%
Dana Perimbangan	0.472738	0.0015	5%
Inflasi	-0.000424	0.9584	5%
Jumlah Penduduk	0.0000195	0.0000	5%

Sumber: Data diolah

1) Pengujian variabel Dana Perimbangan terhadap PAD ini berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan dari Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  = Variabel Dana Perimbangan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel PAD.

$H_1$  = Variabel Dana Perimbangan dapat berpengaruh dan signifikan terhadap variabel PAD.

Hasil regresi dari model Fixed effect menunjukkan nilai probabilitas dari Dana Perimbangan adalah 0,0015. Hal ini berarti  $0,0015 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya variabel independen Dana Perimbangan dapat berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2) Pengujian variabel Inflasi terhadap PAD ini berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  = Variabel Inflasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel PAD.

$H_1$  = Variabel Inflasi dapat berpengaruh dan signifikan terhadap variabel PAD.

Hasil regresi dari model Fixed effect menunjukkan nilai probabilitas dari Inflasi adalah 0,9584. Hal ini berarti  $0,9584 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya variabel independen Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

3) Pengujian variabel Jumlah penduduk terhadap PAD ini berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  = Variabel Jumlah penduduk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel PAD.

$H_1$  = Variabel Jumlah penduduk dapat berpengaruh dan signifikan terhadap variabel PAD.

Hasil regresi dari model Fixed effect menunjukkan nilai probabilitas dari Jumlah penduduk adalah 0,0000. Hal ini berarti  $0,0000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya variabel independen Jumlah penduduk dapat berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya menganalisis variabel independen (Dana Perimbangan, PAD dan Jumlah penduduk) untuk mengetahui apakah memiliki hubungan terhadap Belanja Daerah.

**Tabel 9** Hasil Uji Statistik dari Variabel Belanja Daerah

Variabel	Koefisien Regresi	Prob.	Standart Probabilitas
Belanja Daerah	8.665697	0.0000	5%
Transfer Pemerintah	0.077396	0.2317	5%
PAD	0.344986	0.0000	5%
Jumlah Penduduk	0.00000442	0.0004	5%

Sumber: Data diolah

1. Pengujian variabel Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah ini berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan transfer pemerintah terhadap Belanja Daerah, dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  = Variabel Dana Perimbangan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Belanja Daerah.

$H_1$  = Variabel Dana Perimbangan dapat berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah.

Hasil regresi dari model Fixed effect menunjukkan nilai probabilitas dari Dana Perimbangan adalah 0,2317. Hal ini berarti  $0,2317 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang artinya variabel independen Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

2. Pengujian variabel PAD terhadap Belanja Daerah ini berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah, dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  = Variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Belanja Daerah.

$H_1$  = Variabel Pendapatan Asli Daerah dapat berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah.

Hasil regresi dari model Fixed effect menunjukkan nilai probabilitas dari PAD adalah 0,0000. Hal ini berarti  $0,0000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya variabel independen PAD dapat berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

3. Pengujian variabel Jumlah penduduk terhadap Belanja Daerah ini berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah penduduk terhadap Belanja Daerah, dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  = Variabel Jumlah penduduk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Belanja Daerah.

$H_1$  = Variabel Jumlah penduduk dapat berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah.

Hasil regresi dari model Fixed effect menunjukkan nilai probabilitas dari Jumlah penduduk adalah 0,0004. Hal ini berarti  $0,0004 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya variabel independen Jumlah penduduk dapat berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

#### 4. Adjusted R<sup>2</sup>

Hasil dari uji model Fixed Effect dari PAD menunjukkan nilai R-squared sebesar 0.835748, yang berarti 83,5748% dari variabel independen (Dana Perimbangan, Inflasi dan Jumlah penduduk) dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dan sisanya sebesar 16,4252% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian. Selanjutnya hasil dari uji model Fixed Effect untuk Belanja Daerah menunjukkan nilai dari R-squared sebesar 0,943999, yang berarti 94,3999% dari variabel independen (Dana Perimbangan, PAD dan Jumlah penduduk) dapat mempengaruhi Belanja Daerah dan sisanya sebesar 5,6001% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis Pengaruh Dana Perimbangan, Inflasi dan Jumlah Penduduk terhadap Kinerja Fiskal di Provinsi Jawa Tengah dalam Penerapan Desentralisasi Fiskal Periode 2012 – 2015. Dari analisis dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

Variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD namun jika dibandingkan dengan belanja daerah, variabel ini hanya berpengaruh secara positif namun tidak signifikan. Artinya jika Dana Perimbangan ini naik sebesar 1% maka hasil dari PAD-nya akan naik sebesar 0,472738% dan untuk pengeluaran Belanja Daerahnya akan naik sebesar 0,077396%. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwasanya ketika pendapatan dari Dana Perimbangan naik maka pendapatan PAD juga akan naik dan pengeluaran Belanja Daerahnya juga akan bertambah. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja fiskal ini terlihat cukup bagus. Pemerintah memberikan dana bantuan berupa Dana Perimbangan guna peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan pengalokasian anggaran Dana Perimbangan yang sudah sesuai dengan tujuannya, karena peningkatan PAD lebih besar dari Belanja Daerah. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat kebijakan fiskal dalam penerapan desentralisasi fiskal sudah mulai menunjukkan kinerja yang baik.

Variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Ketika PAD naik 1% maka belanja daerah akan naik sebesar 0,344986%. Kenaikan pengeluaran Belanja daerah lebih reaktif terhadap PAD di bandingkan dengan Dana Perimbangannya. Berarti hasil analisis ini sudah membuktikan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di Jawa Tengah sudah semakin baik. Karena penambahan pengeluaran Belanja daerah lebih peka dengan penambahan PAD dibandingkan dengan peningkatan pendapatan dari transfer pemerintah atau Dana Perimbangan.

Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap dua variabel dependen yaitu variabel PAD dan Belanja Daerah. Ketika jumlah penduduk bertambah 1% maka PAD juga akan naik sebesar 0,0000195% dan Belanja Daerah juga naik sebesar 0,00000442% jika variabel lain bersifat konstan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengaruh pertumbuhan penduduk lebih berimplikasi pada pertumbuhan

PAD-nya dibandingkan dengan Belanja Daerah walaupun pertumbuhan atau penambahannya terlihat sangat kecil.

Variabel Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka ketika Inflasi naik sebesar 1% pendapatan asli daerahnya akan turun sebesar 0,000424%. Hal ini dikarenakan bahwa untuk masyarakat yang berpenghasilan tetap, inflasi menyebabkan dampak buruk bagi kondisi keuangan mereka karena ketika inflasi naik maka nilai real dari pendapatan mereka akan turun. Hal ini akan berdampak pada menurunnya konsumsi masyarakat. Sehingga ketika konsumsi masyarakat turun maka penghasilan daerah dari pajak juga secara otomatis akan ikut turun. Inflasi juga berdampak pada industri di suatu daerah, terutama tentang ekspornya. Ketika biaya produksi dari suatu barang mahal maka harga barang tersebut juga ikut mahal sehingga barang tersebut kurang bersaing dan berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah hal ini dikarenakan industri kurang berkembang dan penghasilan dari pajak menjadi menurun.

## Daftar Pustaka

- Basuki, A. T., & Yuliadi I. (2015). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*, 1 ed. Mitra Pustaka Nurani (MATAN), Yogyakarta.
- Haryanto, J. T. (2015). *Desentralisasi Fiskal Seutubnya*.
- Karim, A. (2010) *Ekonomi Makro Islami*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kartika, T., & Wantara, I. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah dan Kemungkinan Terjadinya Flypaper Effect di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2011.
- Kunarjo. (2002). *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, UI-PRESS, Jakarta.
- Kuncoro, H. (2004). Pengaruh Transfer antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9, 47-63.
- Masdjoko, G. N., & Sukartono. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008, *TEMA*, 32-50.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, 2005.
- Pohan, A. (2008). *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sabthu. (2010). Kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Maluku tahun 1994 - 2009.
- Sasana, H. (2006). Analisis Dampak Transfer Pemerintah Terhadap Kinerja Fiskal Di Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 7, 223-242.
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 46-58.
- Sukirno, S. (2006) *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi ketiga, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Susanto, I. (2014). Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Study Kasus Kota Malang tahun 1998-2012), *Jurnal ilmiah*.
- Turner, M., & Hulme, D. (1977). *Governance, Administration and Development*, MacMillan Press Ltd, Hampshire.
- UU No. 23 Tahun 2014. (n.d.). Pemerintah Daerah.